

**KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PROGRAM
PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)
DI SULAWESI SELATAN**

Sahade

Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

E-mail: sahade@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi PPK dalam menanggulangi kemiskinan di Sulawesi Selatan serta faktor pendukung dan penghambat PPK dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Untuk pembuktian penelitian ini, peralatan analisis yang digunakan adalah Metode Tabulasi atas pernyataan responden, serta menggunakan peralatan Rentang Kriteria sebagai ukuran kategori untuk mengidentifikasi sampai sejauh mana pandangan responden terhadap suatu obyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan kegiatan PPK mendapatkan tanggapan yang baik dari berbagai kalangan masyarakat khususnya di desa/kelurahan yang ditunjukkan dengan hasil analisis data di mana kegiatan PPK mempunyai pengaruh terhadap penuntasan kemiskinan. 2) Pelaksanaan kegiatan PPK tidak hanya berupaya menuntaskan kemiskinan tetapi berupaya melakukan kegiatan pelatihan dalam upaya pengembangan usaha masyarakat desa. Terbukti dari hasil analisis data menunjukkan tanggapan yang baik dimana adanya pengaruh terhadap pengembangan usaha masyarakat. 3) Adapun yang menjadi kendala di lapangan adalah terbatasnya waktu, dana dan tenaga penyuluh lapangan sehingga pelaksanaan di lapangan dirasakan masih kurang optimal.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan

Abstract

This study aims to determine the extent of District Development Program (DDP) contribution in reducing poverty in South Sulawesi and the supporting and inhibiting factors for DDP in reducing poverty in Jeneponto Regency. To prove this research, the analytical tools used are the tabulation method on the respondent's statement, and the criteria range as a category measure to identify the extent to which the respondent's view of an object. The results showed that: 1) The implementation of DDP activities received good responses from various circles of society, especially in villages / sub-districts as indicated by the results of data analysis where DDP activities had an influence on poverty alleviation. 2) The implementation of DDP activities not only seeks to alleviate poverty but also seeks to carry out training activities in efforts to develop village community businesses. It is proven from the results of data analysis showing good responses where there is an influence on community business development. 3) As for the

constraints in the field is the limited time, funds and field extension personnel so that implementation in the field is still not optimal.

Keywords: *Government Policies and Poverty Reduction*

PENDAHULUAN

Perkembangan situasi global dewasa ini semakin tidak menentu dan sangat tidak menguntungkan dan menambah kompleksitas permasalahan yang bertumpu pada beban yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat yang tidak berdaya. Berbagai beban pemerintah dalam memerangi kemiskinan di berbagai sektor pembangunan belum sepenuhnya dapat memecahkan persoalan kemiskinan. Oleh keran itu sebagai salah satu model yang dianggap dapat mengatasi hal tersebut, maka melalui program pengembangan kecamatan (PPK) dengan berpijak pada asumsi bahwa masyarakat harus ikut berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestariannya dapat dijadikan sebagai salah satu wujud dari komitmen pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, merilis persentase data penduduk miskin, di 24 kabupaten/ kota se-Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto, menjadi daerah paling tinggi jumlah penduduk miskinnya. Sebesar 14,88 %. Sementara Kota Makassar, menjadi daerah dengan persentase jumlah penduduk miskin paling sedikit yakni 4,28%. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, pada Maret 2019 mencapai 767,80 ribu jiwa. Angka ini, mengalami penurunan sebesar 24,83 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan data pada Maret 2018. (Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman)

Jika dipersentasekan, penduduk miskin, baik di daerah perkotaan, maupun pedesaan di Sulawesi Selatan, maka pada periode Maret 2018 sebesar 9,0%, turun menjadi 8,69% pada per Maret 2019. Tapi ini kita minta, supaya ada data hasil validasi kembali. Kita minta diselidik sampai ke desa," kata Sudirman di kantor Gubernur Sulsel, Senin (9/12/2019). Dia berharap, data jumlah warga miskin di Sulsel terus diupdate. Mengingat, pasti akan terjadi pergeseran. Bisa saja dia dulu masuk dalam kategori penerima manfaat. Sekarang sudah tidak. Otomatis berubah data. Itu yang kita mau. Makanya, dia berharap, Dinas Sosial bekerja sama dengan seluruh kepala daerah, lebih aktif lagi melakukan pendataan terhadap warga miskin di Sulsel. Ini juga berkaitan, dengan langkah strategis apa yang bisa dilakukan.

Berikut ini, persentase penduduk miskin di 24 kabupaten/kota, yang disampaikan dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan:

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin di 24 kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Kategori 5 Peringkat Teratas, Tahun 2019.

No.	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1.	Jeneponto	14,88

2.	Pangkep	14,06
3.	Luwu Utara	13,60
4.	Selayar	12,83
5.	Luwu	12,78

Sumber: BPS Sulsel, 2019

Berdasarkan data tabel di atas ke lima Kabupaten tersebut masuk dalam Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan kegiatan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman skala perdesaan dan meningkatkan kualitas permukiman perdesaan (78.384 ha, target nasional), melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, program PISEW memberikan stimulasi melalui pembangunan/perbaikan infrastruktur dasar sosial ekonomi berupa infrastruktur transportasi, air minum dan sanitasi, penunjang produksi pertanian dan industri, dan peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian, perternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata.

Penyediaan infrastruktur PISEW tersebut harus diintegrasikan dengan rencana pembangunan lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten sesuai dengan perencanaan pembangunan yang ada, dan yang diarahkan untuk membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan Andris Tuange dalam acara Rapat Koordinasi Awal Tingkat Provinsi Program PISEW, Senin (01/04/2019) di Makassar.

Lanjut Andris, Provinsi Sulawesi Selatan dalam 3 tahun terakhir telah melaksanakan kegiatan PISEW di 113 kecamatan, pada tahun 2019 ini kembali memperoleh Program PISEW sebanyak 66 kecamatan yang tersebar di 13 kabupaten, yaitu Kabupaten Jeneponto, Takalar, Gowa, Bone, Wajo, Sidrap, Pinrang, dan Enrekang, Kabupaten Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara, dimana setiap kecamatan memperoleh anggaran sebesar Rp600 juta dengan pengalokasian Rp10 juta untuk kegiatan administrasi dan OP BKAD, dan Rp590 juta untuk fisik infrastruktur.

Melalui kegiatan tersebut, maka dalam kurun waktu yang singkat telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ditunjukkan oleh terbangunnya sarana dan prasarana yang dapat menciptakan aksesibilitas masyarakat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi baik antara desa, kecamatan, dan kabupaten.

Dengan paradigma tersebut, maka segala aktivitas yang akan dilaksanakan berangkat dari nilai-nilai dan sumber daya lokal sebagai salah satu kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sedangkan peranan pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan yang menunjang aktualitas masyarakat yang bersangkutan. Dalam kaitannya ini penulis akan membatasi pada suatu daerah penelitian yaitu Kabupaten Jeneponto yang dipilih berdasarkan atas besarnya jumlah penduduk miskin. Salah satu penyebab besarnya kemiskinan disebabkan karena daerah ini memiliki keadaan iklim dan sumberdaya alamnya yang kurang subur dimana curah hujannya yang sangat kecil sehingga hasil pertanian dan perkebunannya kurang memberikan kontribusi

terhadap pendapatan penduduknya dibanding kabupaten-kabupaten lainya di Propinsi Sulawesi Selatan.

Adapun total dana yang dikucurkan untuk Kabupaten Jeneponto adalah sebesar Rp. 4.000.000.000 yang dialokasikan untuk kegiatan fisik dan kegiatan ekonomi produktif. Untuk kegiatan fisik berupa: pembangunan sarana dan prsarana air bersih, perbaikan jalan, perbaikan jembatan, gorong-gorong, pengerasan jalan, sumur gali, perbaikan irigasi dan perintisan jalan yang menelan dana sebesar Rp 2.331.012.144 atau 53,3 %. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif berupa: bantuan modal usaha, simpan pinjam, dan dagang kecil dengan jumlah dana Rp 167.678.000 atau 6,70 %. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Jeneponto”.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah aparat PMD dan masyarakat penerima bantuan sebanyak 52 orang. Sampel penelitian ini ditarik secara *purposive sampling* dengan memilih sampel yang dianggap representatif dapat mewakili populasi. Dalam analisis ini digunakan metode analisis deskriptif, dimana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis dengan Metode Tabulasi atau pernyataan responden. Setelah semua bobot jawaban dijumlah, selanjutnya dilakukan penentuan rentang skala yang akan digunakan untuk menentukan kategori penilaian responden atas obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disajikan hasil dan pembahasan sebagai berikut:

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Letak Geografi Kabupaten Jeneponto terletak antara 5o23'12” – 5o42'1,2” Lintang Selatan dan 119o29'12” – 119o56'44,9” Bujur Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 342.700 jiwa pada tahun 2010. Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Takalar di sebelah Utara, Kabupaten Bantaeng di sebelah Timur, Kabupaten Takalar sebelah Barat dan Laut Flores di sebelah Selatan. Luas wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi **114 desa dan kelurahan**, 11 kecamatan, yaitu: **Kecamatan Bangkala, Batang, Kelara, Binamu, Tamalatea, Bontoramba,, Rumbia, Turatea, Tarowang, Arungkeke, Bangkala Barat**. Kabupaten Jeneponto terletak di ujung bagian Barat wilayah Propinsi Sulsel yang jarak tempuhnya dari Kota Makassar sekitar 90 km.

Desa Pallengu merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Letak geografisnya sekitar 8 kilometer dari ibukota Kecamatan dan 28 km dari kota kabupaten. Ketinggian dari permukaan laut : 200 – 1500 m dimana keadaan suhu maksimum 27⁰C dan minimum 18⁰C. Berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun terakhir ini di desa Pallengu

Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, maka curah hujan rata-rata tiap tahun sebanyak 220,958 mm dengan hari hujan rata-rata 11,783 hh. Curah hujan tertinggi pada bulan April-Maret sebanyak 309,3 mm dengan rata-rata hari hujan 15,7 hh sedang terendah jatuh pada bulan September sebanyak 78,4 mm dengan hari hujan 5,8 hh.

2. Potensi Daerah

Kabupaten Jeneponto juga dikenal sebagai penghasil nener dan benur ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di Sulawesi Selatan. Wilayah Pesisir Kabupaten Jeneponto yang merupakan sentra produksi garam satu-satunya di pulau Sulawesi. Produksi garam tidak hanya mencukupi kebutuhan garam yodium untuk provinsi Sulawesi Selatan saja, tetapi juga menyuplai kebutuhan kawasan timur Indonesia. Kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi pohon lontar (siwalan) yang begitu besar jumlahnya yang tersebar pada semua kecamatan sangat memungkinkan untuk pengembangan sentra industri gula merah. Saat ini pengelolaan gula merah rakyat masih dikelola secara tradisional sehingga diperlukan adanya teknologi yang lebih modern untuk pengolahan gula merah yang diharapkan dapat menghasilkan produk gula merah dengan kualitas yang bersaing.

Serikaya, Ballo' Tanning, Ce'la, Bungung Salapang na Coto Jarang.. lima hal yang tak bisa terpisahkan dari Jeneponto. karena memang kelima hal ini selalu identik dengan Jeneponto. Buah serikaya yang mengandung banyak manfaat ini memang banyak terdapat di Kabupaten Jeneponto, bahkan semua penjual serikaya yang ada di Kota Makassar yang berjualan di pinggir jalan Alauddin Makassar tepatnya di depan Pasar Tradisional Pa' Baeng-baeng itu berasal dari Kabupaten Jeneponto. Dini hari mereka sudah berangkat ke Kota Makassar hanya untuk menjajakan buah serikaya hasil kebun mereka di Kota daeng Makassar. Salut untuk orang-orang Jeneponto, mereka benar-benar pekerja Keras istilah Siri' Tuma Siri' melekat erat di dada mereka.

Ballo' Tanning alias Ballo' manis dari sadapan nira pohon lontar atau yang sering disebut oleh masyarakat Jeneponto dengan sebutan pohon Tala', adalah salah satu hal terunik yang ada di Kabupaten Jeneponto. Rasa dari Ballo' Tanning ini memang sangat manis dan tidak membuat penikmatnya mabuk, dari rasanya yang manis itulah sehingga ballo Tanning ini dapat digunakan sebagai minuman pelepas dahaga sehabis menempuh perjalanan jauh. Ballo' Tanning ini juga dapat diolah menjadi gula merah.

Ce'la atau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan garam atau bahasa ilmiahnya Sodium Chloride (NaCl) memang banyak terdapat di Butta Turatea Jeneponto, karena memang Jeneponto adalah salah satu sentra penghasil garam di Sulawesi Selatan. Ce'la alias garam yang dihasilkan Kabupaten Jeneponto masih terbilang tradisional, oleh karena itu garam dari Kabupaten Jeneponto banyak diminati oleh pelaku bisnis di luar Sulawesi Selatan yang nantinya akan diolah kembali untuk menjadi garam konsumsi dan industri. Yang ingin belajar dan mengetahui proses pembuatan garam, silahkan datang saja ke Jeneponto.

Selain itu di Kabupaten Jeneponto ada salah satu kuliner khas Jeneponto yang bernama Coto Kuda dan Gantala' Jarang racikan Jeneponto. "Jarang" dalam bahasa Indonesia berarti kuda. Rasa dari Coto berbahan dasar daging kuda ini hampir sama

dengan rasa coto dengan bahan dasar daging sapi atau kerbau. Bagi anda yang tidak terbiasa menikmatinya mungkin tidak akan berselera untuk mencicipinya, tapi bagi saya coto kuda adalah hidangan yang nikmat dan mengundang selera, konon coto kuda ini dahulu adalah makanan yang khusus dihidangkan untuk para Karaeng (sebutan untuk seorang Raja) dan keluarga bangsawan saja. Setiap ada acara-acara keluarga atau pesta hidangan ini selalu ada, karena menurut orang-orang di Jeneponto, tidak sah atau ada sesuatu yang terasa kurang jika tidak menyuguhkan yang namanya Coto Jarang dan Gantala'na kepada tamu yang datang.

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

Desa Pallengu dengan luas wilayah 12.428 Ha berpenduduk sebanyak 2.849 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.362 jiwa dan perempuan 1.487 jiwa. Kelompok umur 26-55 tahun sebanyak 1.458 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah kelompok 56 tahun keatas sebanyak 231 jiwa. Desa Pallengu mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 2.489 jiwa. Mata pencaharian penduduk desa Pallengu pada umumnya petani sedangkan yang lainnya terdiri dari pengusaha, nelayan, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil, pensiunan (PNS), ABRI dan peternak. Program pengembangan kecamatan dalam menanggulangi kemiskinan mengacu pada kegiatan penuntasan kemiskinan melalui pembangunan saran dan prasarana ekonomi serta penyaluran dana kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah. Untuk membahas permasalahan ini variabel yang akan diteliti adalah kontribusi kegiatan pelatihan dan pengembangan bagi aparat PMD, tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan pendidikan, pengusaha petani.

Ada pun hasil penelitian dengan sampel responden aparat PMD berjumlah 10 orang responden dengan kriteria jawaban sebanyak 5 item, sehingga rentang skalanya adalah : $RS : 10(5-1)/5=8$ berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat disusun rentang kriterianya sebagai berikut: 10 – 18 berarti sangat tidak bagus atau sangat tidak berpengaruh, 19 – 27 berarti tidak bagus atau tidak berpengaruh, 28 – 36 berarti cukup bagus atau cukup berpengaruh, 37 – 45 berarti bagus atau berpengaruh, 46 – 54 berarti sangat bagus atau sangat berpengaruh. Berdasarkan skoring tersebut menunjukkan bahwa terdapat item pertanyaan yang mendapat tanggapan cukup bagus dari responden aparat PMD yang berarti bahwa item pertanyaan tersebut cukup memiliki pengaruh. Aparat PMD berpendapat kegiatan pelatihan merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dari 16 jumlah pertanyaan yang diajukan mendapat tanggapan puas atau memiliki pengaruh terhadap responden. Total skoring yang dicapai adalah sebesar 578 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 item. Dengan demikian rata-rata nilai diperoleh adalah sebesar 36,13 sehingga dikategorikan bahwa responden aparat PMD menyatakan bahwa kegiatan PPK cukup bagus atau cukup berpengaruh terhadap upaya penuntasan kemiskinan.

Responden kalangan pendidikan yang berjumlah 5 orang responden dengan kriteria jawaban sebanyak 5 item. Rentang skalanya adalah : $RS : 5(5-1)/5 =4$. Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat disusun rentang kriterianya sebagai berikut: 5 – 9 berarti sangat tidak bagus atau sangat tidak berpengaruh, 10 – 14 berarti tidak bagus atau tidak berpengaruh, 15 – 19 berarti

cukup bagus atau cukup berpengaruh, 20 – 24 berarti bagus atau berpengaruh, 25 – 29 berarti sangat bagus atau sangat berpengaruh. Berdasarkan rentang skala tersebut di atas, maka hasil skoring pertanyaan yang diajukan diketemukan adanya pertanyaan yang memiliki kategori tidak berpengaruh yaitu pertanyaan 14 mengenai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan pada waktu jam kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan pendidikan tidak respon jika kegiatan pelatihan dilaksanakan pada waktu jam kerja. Nilai rata-rata jawaban dimana total skoring jawaban responden adalah sebesar 460 dan total pertanyaan sebanyak 16 diperoleh hasil sebesar 29. Dengan demikian pengaruh kegiatan sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam menuntaskan kemiskinan mendapat tanggapan dari kalangan pendidikan dengan kategori sangat bagus atau sangat berpengaruh.

Responden petani ini berjumlah 5 orang dengan kriteria jawaban sebanyak 5 item, dengan rentang skalanya adalah : $RS : 5(5-1)/5 = 4$. Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat rentang kriterianya adalah : 5 – 9 berarti sangat tidak bagus atau sangat tidak berpengaruh, 10 – 14 berarti tidak bagus atau tidak berpengaruh, 15 – 19 berarti cukup bagus atau cukup berpengaruh, 20 – 24 berarti bagus atau berpengaruh, 25 – 29 berarti sangat bagus atau sangat berpengaruh.

Berdasarkan skoring tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat item pertanyaan yang mendapat tanggapan sangat bagus atau sangat berpengaruh dari responden petani yang berarti bahwa item pertanyaan tersebut sangat berpengaruh. Selanjutnya terdapat pertanyaan yang mendapat tanggapan petani bahwa kegiatan sosialisasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap penanggulangan kemiskinan tidak bagus atau tidak berpengaruh. Total skoring seluruhnya sebesar 316 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 item. Dengan demikian rata-rata nilai diperoleh adalah sebesar 20. Dengan demikian dapat dikategorikan bahwa responden petani beranggapan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK) mempunyai pengaruh terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat desa.

Tanggapan kalangan petani mengenai kontribusi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap pengembangan usaha masyarakat desa mendapat tanggapan tidak bagus atau tidak berpengaruh dari responden petani mengenai kegiatan Program Pengembangan Kecamatan terhadap pengembangan usaha masyarakat desa. Secara rata-rata total skoring sebesar 308 dengan jumlah pertanyaan seluruhnya sebanyak 16. Dengan demikian nilai skoring menunjukkan sebesar 19 yang berarti dapat dikatakan bahwa kegiatan Program Pengembangan Kecamatan mendapat tanggapan cukup berpengaruh atau cukup bagus terhadap upaya pengembangan usaha masyarakat desa.

Responden penerima bantuan dana PPK ini berjumlah 10 orang dengan kriteria jawaban sebanyak 5 item, sehingga rentang skalanya adalah sebagai berikut: $RS : 10(5-1)/5 = 8$ berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat disusun rentang kriterianya sebagai berikut: 10 – 18 berarti sangat tidak bagus atau sangat tidak berpengaruh, 19 – 27 berarti tidak bagus atau tidak

berpengaruh, 28 – 36 berarti cukup bagus atau cukup berpengaruh, 37 – 45 berarti bagus atau berpengaruh, 46 – 54 berarti sangat bagus atau sangat berpengaruh.

Berdasarkan skoring tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat item pertanyaan yang mendapat tanggapan cukup bagus dari responden penerima bantuan yang berarti bahwa item pertanyaan tersebut cukup memiliki pengaruh. Para penerima bantuan berpendapat kegiatan pelatihan merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dari 16 jumlah pertanyaan yang diajukan mendapat tanggapan puas atau memiliki pengaruh terhadap responden. Total skoring pada tabel 5.10 tersebut di atas adalah sebesar 576 dengan jumlah pertanyaan sebanyak 16 item. Dengan demikian rata-rata nilai diperoleh adalah sebesar 36, sehingga dikategorikan bahwa responden penelitian bantuan menanggapi bahwa kegiatan PPK mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan uraian yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kegiatan PPK mendapat tanggapan yang baik dari berbagai kalangan masyarakat khususnya di desa yang ditunjukkan dengan hasil analisis data dimana kegiatan PPK mempunyai pengaruh terhadap penuntasan kemiskinan. 2) Pelaksanaan kegiatan PPK tidak hanya berupaya menuntaskan kemiskinan tetapi berupaya melakukan kegiatan pelatihan dalam upaya pengembangan usaha masyarakat desa. Terbukti dari hasil analisis data menunjukkan tanggapan yang baik dimana adanya pengaruh terhadap pengembangan usaha masyarakat. 3) Adapun yang menjadi kendala di lapangan adalah terbatasnya waktu, dana dan tenaga penyluh lapangan sehingga pelaksanaan dilapangan dirasakan masih kurang optimal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan bahwa : Dalam upaya menuntaskan kemiskinan dan pengembangan usaha masyarakat desa, maka diharapkan pengelola dana PPK dapat menyalurkan sesuai dengan anggaran yang direncanakan.

DAFTAR RUJUKAN:

- Anonim, (1999). *Pintar Manajemen*. Tim Handal Niaga Pustaka, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi. (1993). *Manajemen Penelitian*, Cetakan II. Penerbit PT. Rineka, Jakarta.
- Bedford-Dearden-Anthony, (1992). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Entang Sastraatmadja. (2017). *Ekonomi Pertanian Indonesia*. Penerbit: Angkasa, Bandung.
- Gibson, James L., John M. Invancevichand James H. Donnely, Jr., (1997). *Organization*, Eight Edition, Richard D. Irwin, Inc., 1995, terjemahan Nunuk Adriani, Editor Lyndon Saputra, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta.
- Handoko, T. Hani, (1998). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, BPFE, Edisi Kedua, BPFE.

- Hasibuan, Malayu S. P., (1997) *Manajemen Sumberdaya Manusia*, Penerbit PT. Toko Aksara, Jakarta.
- Herman Soewandi. (2014). *Respons Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian*. Universitas Padjajaran, Bandung.
- Mosher, A.T., (2008). *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Penyadur: Krisnandi. CV. Yasaguna. Jakarta
- Rita Hanafie. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Lembaga Penerbit, ANDI, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid, dan Achmadi, Abu. (1997). *Metodologi penelitian*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Prawirosentono, Suyadi. (1999). *Manajemen sumberdaya Manusia, Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat membangun Organisasi Kompetitif Menjelang Perdagangan Bebas Dunia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, BPF. Yogyakarta.
- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka, Penyunting Triana Iskandarsyah, Prenhallindo. Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah. (2000). *Produktivitas (Apa dan Bagaimana)*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Tony Wijaya. (2013). *Metode penelitian ekonomi dan bisnis, (Teori dan Praktik)* Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Penerbit: Graha Ilmu, Yogyakarta.